

**ANALISIS REKONSILIASI FISKAL DALAM PERHITUNGAN
PPH TERHUTANG PADA HOTEL NIRWANA
TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

**LILIS SURYANI
NIM : 13622155**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2020**

**ANALISIS REKONSILIASI FISKAL DALAM PERHITUNGAN
PPH TERHUTANG PADA HOTEL NIRWANA
TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

Oleh

LILIS SURYANI

NIM : 13622155

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2020**

TANDA PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI
**ANALISIS REKONSILIASI FISKAL DALAM PERHITUNGAN PPH
TERHUTANG PADA HOTEL NIRWANA TANJUNGPINANG**

Diajukan Kepada :

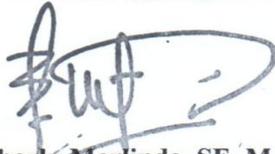
Panitia Komisi Ujian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh

Lilis Suryani
NIM :13622155

Menyetujui :

PembimbingPertama,



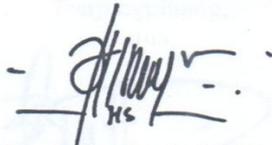
Charly Marlinda, SE. M. Ak. Ak. CA
NIDN . 1029127801 / Lektor

PembimbingKedua,



Maryati, S. P, M. M
NIDN . 1007077101/ Asisten Ahli

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Hendy Satria, S. E., M. Ak.
NIDN. 1015069101 / Lektor

Skripsi Berjudul

**ANALISIS REKONSILIASI FISKAL DALAM PERHITUNGAN PPH
TERHUTANG PADA HOTEL NIRWANA TANJUNGPINANG**

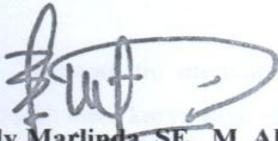
Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Lilis Suryani
NIM : 13622155

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal Empat Belas Januari
Dua Ribu Dua Puluh Dan Dinyatakan
Telah Memenuhi Syarat untuk Diterima

Panitia Komisi ujian

Ketua,



Charly Marlinda, SE., M. Ak. Ak. CA.
NIDN.1029127801/ Lektor

Sekretaris,



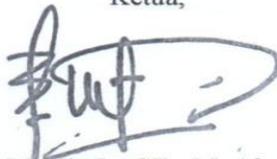
Meidi Yanto, S. E., M. Ak.
NIDK. 8804900016 /Asisten Ahli

Anggota,



Masyitah As Sahara, S. E., M. Si.
NIDN.1010109101/Asisten Ahli

Tanjungpinang, 14 Januari 2020
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang,
Ketua,



Charly Marlinda, SE., M. Ak. Ak. CA.
NIDN.1029127801/Lektor

SURAT PERNYATAAN

Nama : Lilis Suryani
NIM : 13622155
TahunAngkatan : 2013
Index Prestasi Kumulatif : 3,15
Program Studi/Jenjang : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Rekonsiliasi Fiskal Dalam Perhitungan
PPh Terhutang Pada Hotel Nirwana
Tanjungpinang

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa materi dan skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata dikemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 14 Januari 2020
Penyusun,



Lilis Suryani
NIM : 13622155

HALAMAN PERSEMBAHAN

Ya Allah seperak ilmu telah Engkau karuniakan kepadaku,

**Hanya mengetahui sebgian kecil dari yang Engkau miliki sebagaumana
Firman-Mu**

“ Seandainya Air laut menjadi tinta untuk menuliskan perkataan

Tuhan-Ku niscaya keringlah laut sebelum habis perkataan,

Walaupun kami datangkan tinta sebanyak itu sebagai tambahannya”

(Q. S Al-Kahfi: 109)

Dengan Ridho Allah SWT

**Karya dan keberhasilan ini kupersembahkan kepada Ayahanda Ridwan dan
Ibunda Niar yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, dukungan,
do'a serta pengorbanan yang tiada bandingannya demi kesuksesan dan masa
depanku dengan harapan yang baik**

**Terimakasih yang tak terhingga kepada semua saudara, abang, kakak, adik,
orang-orang terdekat, teman-teman dan semua orang yang berperan penting
yang selalu memberikan moril maupun matril, serta dukungan dan
semangat kepada penulis.**

**Akhirnya semua perjuangan berhasil kutempuh walau berawal suka dan
duka, tidak merunduk meski terbentur, tidak mengeluh meski terjatuh, tapi
semangatku tidak pernah pudar.**

HALAMAN MOTO

**Jangan kamu melihat hasil akhir tetapi lihatlah perjalanan menuju
hasil akhir tersebut**

**Janganlah anggap sulit sesuatu hal yang mudah untuk kau jalani,
Karena itu hanya akan mempersulit setiap langkah dihidupmu**

**Ketika suatu masalah menghampiri kehidupanmu janganlah kau
mengeluh, masalah akan terasa semakin berat jika kau selalu
mengeluhkannya**

**'Ilmu pengetahuan tanpa Agama seperti orang buta, dan Agama
tanpa ilmu pengetahuan seperti orang lumpuh'.**

**"Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya" (Q. S Al-Baqarah : 286)**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya penulis diberikan ilmu dan pengetahuan serta wawasan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ANALISIS REKONSILIASI FISKAL DALAM PERHITUNGAN PPH TERHUTANG PADA HOTEL NIRWANA TANJUNGPINANG”.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kepada :

1. Ibu Charly Marlinda, SE.M.Ak.Ak,CA selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang dan juga sekaligus selaku Pembimbing 1 penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang telah banyak memberikan ruang waktu untuk memberikan arahan yang baik dan benar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Ranti Utami, S.E.M.Si.Ak,CA selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Bapak Hendy Satria, S. E., M. Ak. selaku Wakil Ketua II dan sebagai Ketua Prodi Akuntansi S1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang..

4. Ibu Maryati, S.P.,M. M. selaku Pembimbing 2 penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang telah banyak memberikan ruang waktu untuk memberikan arahan yang baik dan benar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang yang telah memberikan ilmu dan dukungan bagi penulis.
6. Kepada Ms. Keny pemilik Hotel Nirwana Tanjungpinang serta selaku Manager dan pengelola Hotel Nirwana Tanjungpinang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan riset/penelitian.
7. Penulis mengucapkan rasa terimakasih yang tak terhingga terutama dan istimewa kepada kedua orang tua penulis yang tercinta, Ayahanda dan Ibunda tersayang, yang telah bersusah paya berjuang membanting tulang memeras keringat untuk membesarkan dan membiayai pendidikan anaknya, yang selalu memberikan motivasi dan nasehat pada penulis. Ilmu ini akan menjadi bekal yang berharga bagi penulis, agar nantinya dapat meraih kesuksesan dan kebahagiaan dunia akhirat, untuk setiap doa yang terlontar dari mulut Ayah dan ibu yang menjadi keberkahan tak terhingga hingga sampai detik ini untuk penulis. Serta, terimakasih juga tak lupa disampaikan untuk abang, kakak, adik kandung serta para saudara-saudara yang sangat berperan penting untuk kehidupan penulis.
8. Sahabat-sahabatku, teman-teman yang juga telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat kepada pembaca, khususnya untuk Mahasiswa-mahasiswi jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tanjungpinang. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga kebaikan dari semua pihak-pihak yang membantu penulis selama penyelesaian skripsi ini mendapatkan balasan pahala berlimpah dari Allah SWT, Amin.

Tanjungpinang, 14 Januari 2020

Penulis

LILIS SURYANI
NIM 13622155

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Hal
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	
SURAT PERNYATAAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN MOTO	
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
ABSTRAK	xvii
<i>ABSTRACT</i>	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Batasan Masalah	9
1.5 Manfaat Penelitian.....	10
1.6 Sistematika Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tinjauan Teori	12
2.1.1 Pengertian Akuntansi.....	12
2.1.1.1 Tujuan Akuntansi	13
2.1.1.2 Fungsi Akuntansi	15
2.1.1.3 Laporan Keuangan	16

2.1.2 Pajak.....	21
2.1.2.1 Fungsi Pajak.....	22
2.1.3 Akuntansi Pajak.....	26
2.1.3.1 Penghasilan Menurut Akuntansi dan Perpajakan.....	29
2.1.3.2 Beban Menurut Akuntansi dan Perpajakan.....	29
2.1.3.3 Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal.....	30
2.1.3.4 Biaya yang Merupakan Pengurangan Penghasilan Kenak Pajak dan Biaya yang Bukan Merupakan Pengurangan Penghasilan Kenak Pajak.....	30
2.1.3.5 Beda Tetap dan Beda Waktu.....	32
2.1.3.6 Biaya Menurut Undang-Undang Perpajakan.....	32
2.2 Kerangka Pemikiran.....	33
2.3 Penelitian Terdahulu.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Jenis Penelitian.....	38
3.2 Lokasi Penelitian.....	39
3.3 Jenis Data.....	39
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.5 Definisi Operasional.....	41
3.6 Teknik Pengolahan Data.....	42
3.7 Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1 Gambaran Umum Perusahaan.....	45
4.1.1 Profil Singkat Perusahaan.....	45
4.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan.....	46
4.2 Hasil Penelitian.....	47
4.2.1 Laba Rugi Komersial.....	47

4.2.2 Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan	50
4.3 Perhitungan PPh Badan	57
BAB V PENUTUP.....	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
CURICULUM VITAE	

DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul Tabel	Hal
Tabel 4.1	Laporan Laba Rugi Periode 31 Desember 2017	47
Tabel 4.2	Rincian Biaya Lain-Lain Periode 31 Desember 2017.....	49
Tabel 4.3	Rekonsiliasi Fiskal Periode 31 Desember 2017	55
Tabel 4.4	Rincian Biaya yang tidak diakui Fiskal Periode Desember 2017	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pemikiran.....	34
Gambar 2 Struktur Organisasi Hotel Nirwana Tanjungpinang.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

- 1.** Laporan Laba Rugi Hotel Bintang Nirwana Tanjungpinang Periode sampai dengan 31 Desember 2017
- 2.** Laporan Neraca Hotel Bintang Nirwana Tanjungpinang Periode sampai dengan 31 Desember 2017
- 3.** Laporan Rincian Biaya Lain-lain Hotel Bintang Nirwana Tanjungpinang Periode 31 Desember 2017
- 4.** Plagiarisme

ABSTRAK

ANALISIS REKONSILIASI FISKAL DALAM PERHITUNGAN PPH TERHUTANG PADA HOTEL NIRWANA TANJUNGPINANG

Lilis Suryani : 13622155

Prodi S1 Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan

Tanjungpinang

email: kangenkamunih21@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Rekonsiliasi Fiskal Dalam Perhitungan PPh Terhutang pada Hotel Nirwana Tanjungpinang. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sempel didalam penelitian ini adalah Manager Hotel Nirwana Tanjungpinang. Metode analisis yang digunakan terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan koreksi fiskal periode tahun 2017 menyebabkan bertambahnya laba sebelum pajak menurut akuntansi hotel Bintang Nirwana Tanjungpinang, yang berjumlah Rp.1.225.131.111 bertambah sejumlah koreksi fiskal positif Rp.38.443.000 menjadi laba sebelum pajak menurut fiskal (Laba fiskal) sejumlah Rp.1.252.033.911. Sehingga PPh badan yang harus dibayar hotel Bintang Nirwana Tanjungpinang menjadi Rp. 175.284.747,54.

Kata Kunci: *Rekonsiliasi Fiskal, PPh Terhutang*

Dosen pembimbing I : Charly Marlinda, SE. M. Ak. Ak. CA

Dosen pembimbing II : Maryati, S. P, M. M

ABSTRACT

ANALYSIS OF FISCAL RECONCILIATION IN CALCULATION PPH IS DEBT IN HOTEL NIRWANA TANJUNGPINANG

Lilis Suryani : 13622155

Prodi S1 Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan

Tanjungpinang

email: kangenkamunih21@gmail.com

This study aims to analyze Fiscal Reconciliation in the Calculation of Income Tax Due at Tanjung Nirang Nirwana Hotel. This type of research uses qualitative methods. The seal in this research is the Hotel Manager Nirwana Tanjung Pinang. The analytical method used consists of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the fiscal correction for the 2017 period led to an increase in profit before tax according to the Bintan Nirwana Tanjungpinang hotel accounting, which amounted to Rp.2,225,131,111, which added a number of positive fiscal corrections of Rp. 1,252,033,911. So that the corporate income tax that must be paid by the Bintan Nirwana Tanjungpinang hotel becomes Rp. 175,284,747,54.

Keywords : Fiscal Reconciliation, Income Tex Payable

Dosen pembimbing I : Charly Marlinda, SE. M. Ak. Ak. CA

Dosen pembimbing II : Maryati, S. P, M. M

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan (UU No. 36, 2008) tentang Pajak Penghasilan, Penghasilan adalah Setiap Tambahan Kemampuan Ekonomis yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Wajib pajak dalam hal ini badan merupakan sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan usaha milik negara/daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan akan dikenakan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang (Direktorat Jenderal Pajak, 2015).

Pajak merupakan harta kekayaan rakyat yang berdasarkan undang-undang atas penghasilan tersebut maka sebagiannya wajib diberikan kepada negara tanpa mendapat kontraprestasi (Fidel, 2010). Pajak juga merupakan unsur yang paling penting untuk menopang anggaran penerimaan negara. Pemerintah menggunakan pajak untuk melaksanakan pembangunan Nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan umum diberbagai sektor kehidupan. Wajib pajak di Indonesia dapat

dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. (Darmawan, 2014) mengemukakan bagi wajib pajak, pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran untuk berkontribusi dalam peningkatan pembangunan nasional.

(Dharma, 2016) mengemukakan bahwa Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah Self Assessment Sistem. Sistem tersebut memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor pajak. (Dharma, 2016) menyatakan secara eksplisit, Self Assessment System merupakan system perpajakan yang sangat rentan menimbulkan penyelewengan dan pelanggaran. Penyelewengan dan pelanggaran tersebut merupakan suatu bentuk dari penghindaran atau perlawanan pajak.

(Adisamartha, 2015) menyatakan terdapat dua fungsi pemungutan pajak yaitu sebagai Regulerent dan Budgeting. Dalam menjalankan fungsi regulerent, pajak digunakan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya pajak yang dikenakan atas barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif dari masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya sebagai budgeting, Pajak haruslah dipungut dengan optimal agar penerimaan pajak meningkat dan membiayai pengeluaran negara maupun daerah.

Perpajakan tersebut selalu menjadi permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan dimana perusahaan akan berusaha untuk membayar pajak dengan jumlah yang kecil. Dilihat dari kehidupan nyata, arti pajak sendiri dipersepsikan

berbeda antara pemerintah dan perusahaan. Jika bagi pemerintah, pajak merupakan sumber pendapatan negara. Maka sebaliknya, bagi perusahaan pajak merupakan beban yang mengurangi laba bersih, sehingga menimbulkan niat perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan cara legal, illegal, atau kedua-duanya. Oleh karena itu, pemerintah negara-negara didunia menaruh perhatian yang begitu besar terhadap sektor pajak. Namun demikian, usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor ini bukan tanpa adanya kendala. Salah satunya kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya penghindaran pajak, bukan tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan data penerimaan pajak dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kenyataannya penerimaan pajak di Indonesia masih belum mampu dicapai dengan maksimal. Mengurangi jumlah beban pajak artinya meningkatkan keuntungan perusahaan (Dharma, 2016). Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah, tidaklah selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan bagi pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun illegal. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara. perusahaan akan berusaha mengelola beban pajaknya seminimum mungkin agar memperoleh laba yang maksimal.

Laporan keuangan memuat informasi mengenai kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh proses akuntansi bertujuan memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan SAK. Laporan keuangan sendiri meliputi catatan atas laporan keuangan berisikan informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dimana memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Neraca merupakan informasi yang menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada tanggal tertentu. Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas pemilik terjadi selama periode waktu tertentu, misalnya sebulan atau setahun. Selanjutnya laporan arus kas adalah suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi investasi dan kegiatan transaksi pembiayaan/pendanaan serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan selama satu periode. Terakhir laporan laba rugi, Laporan ini merupakan penghasilan dan beban entitas pada suatu periode tertentu yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan (Trisnawati, 2013). Laporan laba rugi diwujudkan dalam bentuk laba tetapi laba yang dihasilkan oleh akuntansi itu berbeda dengan ketentuan berdasarkan pajak. Oleh sebab itu, perusahaan diwajibkan melakukan rekonsiliasi fiskal berdasarkan ketentuan dan tata cara perpajakan.

Rekonsiliasi fiskal merupakan dasar untuk menyesuaikan perbedaan antara penyesuaian yang disusun berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Rekonsiliasi

fiskal meliputi koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif adalah koreksi yang menyebabkan laba fiskal oleh pendapatan kena pajak meningkat, sedangkan koreksi fiskal negatif adalah koreksi yang menyebabkan laba fiskal oleh pendapatan kena pajak menurun. Rekonsiliasi tersebut menunjukkan perbandingan antara laba komersial dengan laba fiskal disebut dengan *books tax differences* (Muljono, 2009)

Book-tax differences meliputi 2 perbedaan yang dikelompokan yaitu perbedaan permanen dan temporer. Perbedaan permanen merupakan perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal yang disebabkan oleh perbedaan ketentuan antara SAK dan Undang-Undang Perpajakan (Fadlilah, 2013) Beberapa contoh diantaranya seperti PPh Final, penghasilan atas bunga deposito atau tabungan lainnya yang telah dipotong PPh Final oleh Bank sebesar 20%. Penghasilan yang bukan objek pajak, misalnya dividen yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri dari penyertaan modal sebesar 25% atau lebih pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia (Pasal 4 ayat 3 UU PPh).

Sanksi perpajakan, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Penghasilan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan pribadi pemegang saham, pembayaran bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk keperluan pribadi peminjam serta pembayaran premi asuransi untuk kepentingan pribadi, tidak boleh dibebankan sebagai biaya (Direktorat Jenderal Pajak, 2013)

Perbedaan temporer merupakan perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal yang disebabkan oleh perbedaan alokasi setiap tahunnya. Contohnya penyusutan dan amortisasi, antara akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan terdapat perbedaan pengelompokan, umur manfaat, tarif yang ditetapkan, dan banyaknya metode yang dapat digunakan. Akrual dan realisasi, yang dalam pendapatan dan biaya diperbolehkan dalam akuntansi, tetapi tidak diperbolehkan dalam perpajakan (Brolin, 2014). Kompensasi kerugian, jika Wajib Pajak yang menggunakan pembukuan mengalami kerugian dalam tahun-tahun sebelumnya maka kerugian fiskal dapat dikompensasi selama 5 tahun berturut-turut dimulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun bagi Wajib Pajak yang mendapat fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang usaha/daerah tertentu. Kerugian yang diderita di luar negeri tidak dapat diikuti sertakan dalam perhitungan kompensasi kerugian, (Direktorat Jenderal Pajak, 2013). Artinya bahwa kompensasi kerugian dapat menurunkan pajak penghasilan sehingga laba setelah pajak menjadi lebih besar.

Books-tax differences secara temporer dan permanen berpengaruh terhadap pertumbuhan laba di masa yang akan datang. Perbedaan temporer menunjukkan adanya perbedaan waktu antara ketentuan perundang-undangan perpajakan dengan ketentuan SAK. Contohnya, penyusutan di tahun 2016 disusutkan oleh pajak selama 4 tahun dan untuk akuntansi selama 5 tahun dapat menyebabkan besaran beban penyusutannya berbeda, perbedaan tersebut berpengaruh pada periode di masa depan pada pertumbuhan laba. Artinya

penghasilan kena pajak pada periode masa depan menurun, sehingga beban pajak juga akan menurun. Hal ini berpengaruh pada laba setelah pajak pada periode di masa depan. Perbedaan permanen, perbedaan laba komersial dan laba fiskal yang disebabkan oleh perbedaan peraturan (Fitri, 2014). Contohnya sanksi pajak tidak boleh dikurangkan sebagai beban pajak pada periode di masa depan. Kedua perbedaan tersebut memunculkan istilah pajak tangguhan.

Pengujian pengaruh books-tax differences baik secara temporer maupun permanen terhadap pertumbuhan laba sudah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu sebelumnya beranggapan bahwa penelitian yang dilakukan oleh (Fadlilah, 2013) menunjukkan bahwa berdasarkan hasil uji hipotesis terdapat pengaruh negatif antara variabel perbedaan temporer terhadap pertumbuhan laba, tetapi tidak berpengaruh pada perbedaan permanen. (Brolin, 2014) menunjukkan bahwa perbedaan temporer memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan laba dengan arah positif.

Sedangkan perbedaan permanen tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan laba. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Febiyanto, 2014) menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan permanen dan perbedaan temporer berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba. Oleh sebab itu, penelitian ini akan menganalisis berdasarkan perbedaan yang telah dikemukakan oleh beberapa peneliti dengan kesimpulan yang berbeda mengenai perbedaan komersial dan fiskal atas perbedaan permanen dan temporer yang berpengaruh terhadap pertumbuhan laba.

Dalam penyusunan laporan keuangannya, perusahaan mengikuti suatu prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK dikenal dengan istilah laporan keuangan komersial. Untuk memenuhi kebutuhan pelaporan pajak maka perusahaan melakukan koreksi fiskal. Dalam mengakui penghasilan dan beban, terdapat perbedaan antara Akuntansi komersial dan Akuntansi pajak baik karena beda cakupan maupun perbedaan saat pengakuan dan menetapkan laba sebelum pajak. Laporan keuangan komersial yang telah dikoreksi dinamakan Laporan keuangan Fiskal.

Dengan perbedaan tersebut mengakibatkan adanya perbedaan antara laba/rugi komersial dan laba/rugi fiskal, sehingga untuk menghitung besarnya pajak penghasilan terhutang perlu dilakukan koreksi fiskal atas laba/rugi komersialnya. Dengan demikian, yang perlu dilakukan wajib pajak untuk menghitung pajak penghasilannya adalah membuat laporan keuangan Standar Akuntansi Keuangan, kemudian melakukan koreksi terhadap penghasilan dan beban.

Hal yang sering terjadi di perusahaan itu ada beberapa yang membuat laporan keuangan tidak sesuai dengan ketentuan laporan keuangan dan tata cara perpajakan atau undang-undang pajak yang berlaku. Sehingga, akan berdampak pada kesalahan menghitung hutang pajak dalam hal penerimaan pajak kepada Negara.

Berdasarkan latar belakang diatas dan beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

”Analisis Rekonsiliasi Fiskal Dalam Perhitungan PPh Terhutang pada Hotel Nirwana Tanjungpinang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelian ini adalah:

1. Bagaimana hotel Nirwana Tanjungpinang menghitung pajak terhutang dengan ketentuan dan tata cara perpajakan?
2. Bagaimana hotel Nirwana Tanjungpinang Mengoreksi Laba Komersial menjadi Laba Fiskal menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang PPh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui apakah PPh terhutang pada Hotel Nirwana sudah sesuai dengan ketentuan dan tata cara perpajakan.
2. Untuk Mengetahui bagaimana hotel Nirwana Tanjungpinang Mengoreksi Laba Komersial menjadi Laba Fiskal menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang PPh pasal 25

1.4 Batasan Masalah

Bukan hanya satu, melainkan beberapa pajak penghasilan yang harus dilaksanakan wajib pajak yang berbentuk badan usaha ini, diantaranya PPh Pasal 15,PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23,PPh

Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 4 (2). Besarnya PPh yang terutang bergantung pada jumlah besarnya laba sebelum pajak. Penelitian ini di fokuskan pada PPh pasal 25, yaitu: pembayaran pajak penghasilan secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan.

1.5 Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang Analisis Rekonsiliasi Fiskal dalam Perhitungan PPh Terutang pada Hotel Nirwana Tanjung pinang”.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi suatu wadah pengetahuan bagi para mahasiswa serta seluruh jajaran universitas untuk menjadikan suatu pengetahuan tambahan di dalam materi akuntansi tentang Analisis Rekonsiliasi Fiskal dalam Perhitungan PPh Terutang pada Hotel Nirwana Tanjung pinang”.

1.6 Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah Pembacaan yang lebih akurat dan memberikan gambaran secara menyeluruh masalah yang akan dibahas, maka sistematika penulisan dibagi menjadi 5 bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini Menjelaskan tentang latar belakang masalah mengenai judul yang dipilih menjadi penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dibahas mengenai landasan teori yang berisi teori-teori yang menunjang penelitian yang berasal dari buku, jurnal, review penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dari penelitian, pengembangan hipotesis dan hipotesis.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan mengenai ruang lingkup dan objek penelitian, metode penelitian yang digunakan, operasional variable penelitian, metode yang digunakan dalam menentukan prosedur pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan berdasarkan kondep-konsep yang telah dijelaskan.

BAB V PENUTUP

Bab ini mengemukakan kesimpulan yang diambil dari hasil pembahasan masalah sebelumnya, serta saran-saran mengenai perbaikan yang mungkin dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian keadaan ekonomi suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntansi merupakan satu kesatuan sistem informasi pemrosesan data sehingga laporan keuangan yang menggambarkan keadaan perusahaan.

Menurut (Donald E. Kieso Jerry Weygandt, 2016) Akuntansi terdiri dari tiga kegiatan yang mendasar yaitu identifikasi, pencatatan dan pengkomunikasian peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Perusahaan mengidentifikasi peristiwa ekonomi sesuai dengan kegiatan usahanya dan mencatat peristiwa tersebut untuk menyediakan catatan kegiatan keuangan.

Pencatatan dilaksanakan secara sistematis, kronologis setiap peristiwa, dalam satuan mata uang. Akhirnya pada pengkomunikasian kumpulan informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan dalam bentuk laporan akuntansi atau dikenal dengan laporan keuangan.

(Kartikahadi, 2016) pengertian akuntansi adalah :“Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan”.Secara umum, akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Selain itu,ada juga pengertian akuntansi menurut (Suhayati, 2009)

menyatakan bahwa: Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang dan penginterpretasian hasil proses tersebut.

(Thomson, 2008) “Akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktifitas ekonomi dan kondisi perusahaan”. Sistem akuntansi mencatat data ekonomi mengenai kegiatan perusahaan dan hal-hal yang terjadi pada perusahaan, yang hasilnya dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kebutuhan informasi mereka.

Pengertian Akuntansi menurut (Suwardjono, 2013) akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, dan penginterpretasian hasil proses tersebut. Dari semua definisi menurut para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian hasil akhir berupa laporan keuangan yang mencerminkan keadaan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2.1.1.1 Tujuan Akuntansi

(Hasanuh, 2011) Akuntansi mempunyai tujuan utama adalah untuk memberikan informasi ekonomi, antara lain tentang aktiva, hutang, modal, proyeksi laba serta perubahan aktiva dan hutang. Lebih jelasnya adalah bertujuan menghasilkan laporan keuangan. Adapun informasi keuangan yang terkandung

dalam laporan keuangan akan bermanfaat bila memenuhi karakteristik informasi yang berkualitas, antara lain :

1) Relevan

Relevan informasi harus dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Bila informasi tidak relevan untuk maksud keperluan para pengambil keputusan, informasi demikian tidak akan ada gunanya.

2) Dapat dimengerti

Informasi harus dapat dimengerti oleh pemakainya dan dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan batas pengertian para pemakai.

3) Daya uji

Informasi yang dihasilkan harus bisa diuji kebenarannya oleh para pengukur yang indenpenden dengan menggunakan metode pengukuran yang sama untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya. Artinya bahwa informasi yang dihasilkan harus berlandaskan pada realitas obyektif dengan adanya bukti.

4) Netral

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai dan tidak bergantung kepada kebutuhan dan keinginan pihak-pihak tertentu.

5) Tepat waktu

Informasi harus disampaikan sedini mungkin supaya digunakan secepat mungkin dalam pengambilan keputusan manajemen.

6) Daya banding

Format dari informasi harus konsisten dan berlaku umum, sehingga bisa dibandingkan, baik dengan informasi dari periode yang lalu maupun dari perusahaan yang sejenis.

7) Lengkap

Informasi Akuntansi harus lengkap dengan meliputi seluruh data Akuntansi keuangan, sehingga penerima informasi bisa memahami secara keseluruhan dan tidak mempunyai pemahaman yang salah atas informasi tersebut.

2.1.1.2 Fungsi Akuntansi

(Warsono-bin-Hardono, 2013) adapun fungsi dasar akuntansi adalah menyediakan informasi dana suatu entitas atau unit organisasi. Dianalogikan dengan kendaraan sepeda motor, papan panel (dashboard) menyajikan beragam informasi yang diperlukan pengendara. speedometer menunjukkan kecepatan laju kendaraan, tachometer menunjukkan kecepatan putaran mesin per menit (*RPM – round per minute*), dan *fuel indicator* menunjukkan tingkat ketersediaan bahan bakar. Jenis kendaraan yang lebih canggih akan semakin banyak informasi yang tersaji di papan panel, di pesawat terbang terdapat *altometer*, *attitude indicator*, *heading indicator*, dll. Dengan informasi ini pengendara dapat mengetahui keadaan selama berkendara.

Hampir setiap orang memperoleh dana (berupa gaji, kiriman orang tua, dll) dan menggunakan dana (berupa pembelian buku, membayar sewa, dll). Yang perlu diketahui, dana tidak sebatas uang tunai atau tabungan. Sesuatu yang bernilai

(*valuable things*) dan dapat diukur menggunakan satuan uang layak disebut sebagai dana. Di era sekarang uang merupakan salah satu alat pertukaran dalam banyak aktivitas. Oleh karena itu, adalah wajar jika pengelolaan dana merupakan hal yang krusial. Untuk itu Akuntansi sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan informasi tentang kondisi maupun perkembangan dana.

2.1.1.3 Laporan Keuangan

Di dalam SAK sendiri mengatur berbagai bagian dari akuntansi seperti laporan keuangan yang menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklarifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Kelompok besar yang dimaksud adalah unsur – unsur yang terdapat dalam laporan keuangan yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban.

a. Pengertian Laporan Keuangan

Kesatuan sistem informasi akuntansi yang melalui proses pengklasifikasian, pencatatan, pengikhtisaran akan menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan yang telah disusun mencerminkan keadaan suatu perusahaan. Para ahli mendefinisikan pengertian laporan keuangan sebagai berikut:

1. Menurut (Kartikahadi, 2016) laporan keuangan adalah media utama bagi suatu entitas untuk mengkomunikasikan informasi keuangan oleh manajemen kepada para pemangku kepentingan seperti : pemegang saham, kreditur, serikat pekerja, badan pemerintahan, manajemen. Pengertian laporan keuangan menurut

2. (Donald E. Kieso Jerry Weygandt, 2014) Laporan keuangan hanya merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak diluar perusahaan. Laporan keuangan yang sering disajikan adalah laporan posisi keuangan, laporan laba-rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian integral dari setiap laporan keuangan.

3. Menurut (Ikatan Akuntansi Indonesia No.1, 2015) “Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.” Laporan ini menampilkan sejarah entitas yang dikuantifikasi dalam nilai moneter.

4. Pengertian laporan keuangan menurut (Ikatan Akuntansi Indonesia No.1, 2015) merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.

Penjelasan di atas dapat diartikan tujuan umum laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan suatu entitas yang berguna bagi keputusan investor, kreditur, dan kreditur lainnya dalam membuat keputusan mengenai penyediaan sumber daya bagi perusahaan. Di dalam bukunya, Belkaoui mengatakan akuntansi sebagai suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, dan

pengikhtisaran dalam cara yang signifikan dan satuan mata uang, transaksi dan kejadian yang paling tidak sebagian diantaranya, memiliki sifat keuangan dan selanjutnya menginterpretasikan hasilnya. Banyak sudut pandangan yang mendefinisikan arti dan peran akuntansi. agar tidak menyimpang, maka dibentuklah Standar Akuntansi Keuangan dimana semua prinsip – prinsip akuntansi yang berlaku umum terdapat didalamnya sebagai sebuah acuan pencatatan suatu transaksi. Sehingga disetiap kegiatan akuntansi selalu berpedoman pada SAK (Standar Akuntansi Keuangan) sebagai penentuan salah dan benar di dalam Akuntansi.

b. Pengguna Laporan Keuangan

(Hasanuh, 2011) pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan maupun perkembangan aktivitas perusahaan antara lain: Para pemilik perusahaan, Manajer yang bersangkutan, Para kreditur, Bankers, para Investor dan Pemerintah serta buruh juga pihak-pihak lainnya. Laporan keuangan merupakan suatu alat untuk mempertanggungjawabkan berbagai aktivitas perusahaan yang telah dilakukan kepada para pemilik perusahaan. dan, pertanggungjawaban itu di tuangkan kedalam laporan keuangan yang dibuat setelah diaudit oleh Auditor dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip Akuntansi yang berlaku umum. laporan keuangan digunakan untuk:

- a) Mengukur tingkat biaya dari berbagai aktivitas yang dilakukan perusahaan.
- b) Untuk menentukan atau mengukur efisiensi tiap-tiap bagian, proses atau produksi serta menentukan derajat keuntungan yang dicapai perusahaan.

- c) Untuk menilai dan mengukur hasil kerja tiap-tiap individu yang telah diberi wewenang dan tanggung jawab.
- d) Untuk menentukan perlu tidaknya penggunaan kebijakan atau prosedur yang baru untuk mencapai hasil yang lebih baik. Laporan Keuangan menggambarkan kondisi dan posisi keuangan serta hasil usaha suatu perusahaan pada periode tertentu. Laporan keuangan dapat dengan mudah disusun sesuai dengan format yang ditentukan dengan data yang kita peroleh dan pencatatan sebelumnya dengan bantuan kertas kerja.

c. Penghasilan Menurut SAK

”Penghasilan (Income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Menurut (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2018) menyatakan bahwa pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Pada umumnya imbalan tersebut berbentuk kas atau setara kas dan jumlah pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau dapat diterima. Pendapatan yang diterima dari penjualan jasa dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut diakui dengan mengacu pada nilai penyelesaian dari transaksi pada akhir periode pelaporan.

d. Biaya dan Beban Menurut SAK

Menurut (Carter, 2009) biaya adalah suatu nilai tukar, pengeluaran, pengorbanan yang dikeluarkan untuk menjamin memperoleh manfaat.

Kesimpulannya : biaya hanya di artikan sebagai suatu nilai tukar, pengeluaran, untuk memperoleh manfaat. Disini tidak di jelaskan secara rinci pengeluaran untuk apa? nilai tukar apa? Dan semua ini di peroleh untuk menghasilkan manfaat, biaya dapat didefinisikan suatu pengorbanan ekonomi untuk meraih atau mendapatkan apa yang menjadi tujuannya baik berupa pengeluaran dalam bentuk barang maupun jasa sehingga dapat memperoleh manfaat sesuai yang dibutuhkannya.

Definisi Beban adalah suatu yang dikeluarkan atau dikorbankan dengan tujuan untuk dapat memperoleh pendapatan, misalnya akun-akun yang terdapat dalam laporan laba rugi seperti beban listrik, beban penyusutan, beban sewa, beban gaji, dan lain-lain.

Beban atau expense adalah pengurangan atas pendapatan yang akan menghasilkan laba bersih sebelum adanya pajak dalam laporan laba-rugi. Maka dalam hal ini beban diperkirakan berupa jenis yang paling banyak jumlahnya, dapat diklarifikasi secara sederhana menjadi beban operasional, beban perolehan pendapatan, dan lain-lain

e. Penyusutan Menurut SAK

Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2018) Pengurangan nilai aset harus dilakukan secara bertahap dan penyusutan dimulai pada tahun pengeluaran asset tersebut. Ada dua metode yang biasa dipakai dalam penyusutan, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun.

2.1.2 Pajak

Pajak merupakan salah satu wujud kepedulian masyarakat terhadap pembiayaan dan pembangunan negara dan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

Menurut para ahli yang mendefinisikan pengertian pajak yaitu seperti dibawah ini:

- a. (Adriani, 2014) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.
- b. (Soemitro, 2014) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- c. (Resmi, 2014) pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan , kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.
- d. (Resmi, 2014) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma – norma yang ditetapkan secara umum), tanpa

adanya kontrapretasi, dan semata – mata digunakan untuk pengeluaran – pengeluaran umum.

e. (Djajadiningrat, 2008) pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke Kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan ,tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Dari beberapa pengertian pajak yang telah diuraikan, maka dapat penulis simpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapat jasa imbalan yang langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara. Dan dapat disimpulkan juga bahwa pajak pun memiliki unsur,antara lain:

1. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan imbalan secara langsung satu persatu oleh pemerintah
4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

2.1.2.1 Fungsi Pajak

(Mardiasmo, 2018) fungsi budgetair (Pendanaan) yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, yaitu pajak dimanfaatkan sebagai instrument pengumpul dana guna membiayai pengeluaran – pengeluaran pemerintah. Yang kedua adalah fungsi regulair

(Mengatur) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Beberapa bagian yang berkaitan dengan pajak:

a. Pajak yang Ditanggung Perusahaan

Perusahaan merupakan subjek pajak badan yang memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Saat dimulainya kewajiban perusahaan membayar pajak adalah pada saat perusahaan tersebut didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Sedangkan saat berakhirnya status subjek pajak perusahaan yaitu ketika perusahaan dibubarkan dan dilikuidasi atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.

b. Pajak Penghasilan Badan

Bukan hanya satu, melainkan beberapa pajak penghasilan yang harus dilaksanakan wajib pajak yang berbentuk badan usaha ini, diantaranya PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 4 (2). Besarnya PPh yang terutang bergantung pada jumlah besarnya laba sebelum pajak.

c. Rekonsiliasi Fiskal

Koreksi fiskal (Rekonsiliasi fiskal) adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung pajak penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi (yang menggunakan pembukuan dalam menghitung penghasilan kena pajak). Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan perlakuan/pengakuan penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak. Menurut (Hery, 2014) laporan

keuangan komersial adalah memberikan informasi kepada para pengguna tentang posisi keuangan dan hasil kinerja atau kegiatan operasional perusahaan (laba atau rugi komersial) tidak terlepas dari proses penetapan dan penandingan secara periodik antara pendapatan dan beban. Sedangkan dalam laporan keuangan fiskal adalah menetapkan besarnya penghasilan kena pajak, khususnya yang terkait dengan kewajiban pajak penghasilan. Disamping itu, juga terkait dengan pembukuan atas kewajiban untuk memungut pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah.

d. Pembukuan Sebagai Dasar

Penghitungan Pajak Dasar yang dapat digunakan untuk memperoleh besaran laba kena pajak (penghasilan kena pajak) adalah dengan cara penghasilan bruto dikurangi dengan biaya dan beban, cara demikian ini tidak lain adalah pembukuan. Dalam pembukuan ini informasi yang terpenting untuk menghitung PPh yang terutang yaitu penghasilan dan biaya.

e. Klasifikasi Penghasilan

(Muljono, 2009) penghasilan di dalam akuntansi pajak dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu:

- a) Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan.
- b) Penghasilan yang sudah terkena PPh final.
- c) Penghasilan yang merupakan objek pajak.

f. Klasifikasi Biaya

(Muljono, 2009) pengeluaran – pengeluaran perusahaan dibagi menjadi dua yaitu biaya yang diperkenankan untuk pengurangan penghasilan kena pajak dan penghasilan yang bukan merupakan pengurangan penghasilan kena pajak.

g. Timbulnya Koreksi Fiskal

(Muljono, 2009) perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya yang terjadi antara keuangan komersial dan fiskal menimbulkan adanya perbedaan dalam perhitungan besarnya penghasilan kena pajak yang berdasar kepada laporan keuangan perusahaan. Perbedaan yang timbul antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal menyebabkan dua perbedaan mendasar, yaitu perbedaan waktu dan perbedaan tetap / permanen.

h. Jenis Koreksi Fiskal

(Muljono, 2009) hanya terdapat dua jenis koreksi fiskal yang dilakukan terhadap laporan laba rugi komersial perusahaan, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negative. Yang intinya koreksi fiskal positif adalah koreksi fiskal menambah besarnya laba kena pajak. Koreksi fiskal negatif adalah koreksi fiskal yang mengurangi laba kena pajak.

i. Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan penghitungan pajak. Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan penghitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan

untuk menilai hasil usaha (Income statement) dan keadaan keuangan (Balance Sheet) dari satu entitas, sedangkan laporan keuangan fiskal ditujukan untuk menghitung penghasilan kena pajak dan beban pajak yang harus dibayar ke negara. Laporan keuangan komersil berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) atau standar lain, sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Perpajakan lain. Perbedaan penggunaan standar atau prinsip dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan – terutama laporan rugi laba mengakibatkan perbedaan perhitungan laba rugi suatu entitas (Wajib Pajak) antara laba rugi komersil dan laba rugi fiskal, yang akan berakibat adanya perbedaan beban pajak komersial dan beban pajak seharusnya dibayar ke negara. Setelah melakukan koreksi fiskal berdasarkan laporan keuangan komersial, kita dapat mengetahui laporan keuangan fiskal yang berguna dalam pelaksanaan pembayaran pajak.

2.1.3 Akuntansi Pajak

Akuntansi tidak dapat dipisahkan dari kegiatan ekonomi kita dengan cara mencatat pengeluaran dan pendapatan. Karena dengan memiliki pencatatan yang baik, maka akan mempermudah kita dalam menghitung besarnya pajak yang harus kita bayar kepada negara sebagai suatu iuran juga menjadi terstruktur dan tepat sasaran.

Menurut (Trisnawati, 2013) pengertian akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan.

Secara umum Akuntansi Perpajakan (Tax Accounting) adalah suatu proses mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan dan menafsirkan transaksi-transaksi finansial yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan tujuan menentukan jumlah penghasilan kena pajak yang diperoleh atau diterima dalam suatu tahun pajak guna sebagai dasar penetapan beban atau pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak. Dalam hal ini wajib pajak adalah wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Definisi lain akuntansi perpajakan yaitu salah satu cabang akuntansi yang mencatat, menangani, menghitung, menganalisa dan membuat strategi perpajakan sehubungan dengan transaksi perusahaan.

Prinsip Akuntansi Perpajakan

(Muljono, 2009) Prinsip Akuntansi perpajakan dapat dibagi menjadi 5, yaitu:

1. Kesatuan Akuntansi

- a) Akuntansi dalam hal ini perusahaan dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi yang terpisah dengan suatu pihak yang mempunyai kepentingan dengan sumber perusahaan.
- b) Ada pemisahan yang jelas antara perusahaan dengan pemilik, persero atau pemegang saham, mengenai kekayaan, hutang-piutang, penerimaan dan pengeluaran uang, antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan pribadi pemilik/pemegang saham tidak boleh bercampur.

2. Kesenambungan

Dalam prinsip ini bahwa suatu entitas ekonomi diasumsikan akan terus menerus melanjutkan usahanya dan tidak akan dibubarkan.

3. Harga Perturakaran Yang Obyektif

Transaksi keuangan harus dinyatakan dengan nilai berupa uang. Objektif artinya:

- Tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa
- Bisa diuji oleh pihak independen
- Tidak adanya transfer pricing
- Tidak adanya mark up, tidak ada KKN dan lainnya

4.Konsistensi

Dalam prinsip ini dapat dikatakan bahwa pemakaian metode dalam suatu pembukuan tidak bisa diubah-ubah, harus Konsisten. Contohnya menentukan buku tahunan perhitungan persediaan dan lain sebagainya.

5. Konservatif

Prinsip konservatif mengandung arti kemungkinan rugi (belum direalisasi, masih merupakan tafsiran) sudah diakui sebagai kerugian, dengan cara membentuk penyisihan atau cadangan. Sementara itu, kemungkinan laba yang timbul tidak diakui. Secara Akuntansi Prinsip Konservatif diterapkan pada berbagai kegiatan seperti berikut ini :

- 1) Penyisihan piutang
- 2) Penyisihan potongan penjualan
- 3) Penyisihan retur penjualan
- 4) Penyisihan klaim
- 5) Penyisihan biaya setelah pennjualan

- 6) Penilaian persediaan barang dagangan berdasarkan “Harga pokok dan Harga pasar mana yang paling rendah”

2.1.3.1 Penghasilan Menurut Akuntansi dan Perpajakan

a. Penghasilan menurut Akuntansi

Penghasilan (Income) adalah penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan (Revenues) dan keuntungan (Gains).

b. Penghasilan menurut Perpajakan

Penghasilan adalah segala tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak. Baik, yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang bisa dikonsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.1.3.2 Beban Menurut Akuntansi dan Perpajakan

a. Beban menurut Akuntansi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomis pada masa mendatang sehubungan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban yang dapat diukur dengan modal.

b. Beban menurut Perpajakan

Beban adalah pengeluaran biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak atau laba kena pajak.

2.1.3.3 Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal

(Hery, 2016) Rekonsiliasi laporan keuangan fiskal adalah penyesuaian ketentuan menurut pembukuan secara komersial atau akuntansi yang harus disesuaikan menurut ketentuan perpajakan.

2.1.3.4 Biaya yang merupakan pengurang penghasilan kenaik pajak dan biaya yang bukan merupakan pengurang penghasilan kenaik pajak

Menurut (Muljono, 2009) :

Biaya yang merupakan pengurang penghasilan kenaik pajak

1. Biaya yang berkaitan dengan karyawan : misalnya gaji dan peningkatan SDM
2. Biaya yang berkaitan dengan harga pokok penjualan : persediaan, biaya overhead pabrik
3. Biaya yang berkaitan dengan bunga : PPh final, bunga pinjaman deposito, bunga pada masa konstruksi, dll.
4. Biaya yang berkaitan dengan sewa : tanah, bangunan, kendaraan, dll.
5. Biaya yang berkaitan dengan royalti
6. Biaya yang berkaitan dengan perjalanan
7. Biaya yang berkaitan dengan administrasi perjalanan
8. Biaya yang berkaitan dengan asuransi
9. Biaya yang berkaitan dengan pajak-pajak daerah
10. Biaya yang berkaitan dengan penyusutan dan amortisasi
11. Biaya yang berkaitan dengan dana pension

12. Biaya yang berkaitan dengan kerugian :kerugian biaya yang dibebankan sebagai biaya tahun berjalan, dan kerugian yang dikompensasikan pada tahun berikutnya.
13. Biaya yang berkaitan dengan produk : biaya penelitian, pengembangan, dan pengolahan limbah.
14. Biaya yang berkaitan dengan piutang yang nyata-nyata tidak tertagih
15. Biaya yang berkaitan dengan cadangan : perbankan, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan asuransi, perusahaan pertambangan
16. Biaya yang berkaitan dengan entertainmen
17. Biaya yang berkaitan dengan pajak pertambahan nilai (PPN) : selisih antara masukan dan keluaran, masukan yang tidak dapat dikreditkan.
18. Biaya yang berkaitan dengan penjualan : biaya promosi dan komisi penjualan
19. Biaya yang berkaitan dengan pemberian dalam bentuk natura/kenikmatan sebagai keharusan dan di daerah terpencil
20. Biaya yang berkaitan dengan kepemilikan aktiva tertentu : telepon selular, kendaraan bus dan minibus, kendaraan sedan, software computer, aktiva yang didapat secara sewa guna usaha dengan hak opsi

Biaya yang bukan merupakan pengurang penghasilan kena pajak

1. Pembagian laba : Deviden, Pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Biaya pribadi pemegang saham
3. Pembentukan dana cadangan
4. Premi Asuransi

5. Penggantian dalam bentuk natura dan kenikmatan
6. Jumlah pembayaran yang melebihi kewajiban
7. Harta yang dihibahkan
8. Pajak penghasilan
9. Biaya pribadi
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan
11. Sanksi administrasi

2.1.3.5 Beda Tetap dan Beda Waktu

Beda tetap dan beda waktu menurut (Muljono, 2009) adalah :

- a. Beda tetap terjadi apabila terdapat transaksi yang diakui oleh wajib pajak sebagai penghasilan atau sebagai biaya sesuai akuntansi secara komersial, tetapi berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan, transaksi dimaksud bukan merupakan penghasilan atau bukan merupakan biaya, atau sebagian merupakan penghasilan atau sebagian merupakan biaya.
- b. Beda waktu terjadi karena adanya perbedaan pengakuan besarnya waktu secara akuntansi komersial dibandingkan dengan fiskal, misalnya dalam hal :
 1. Waktu pengakuan manfaat dari aktiva yang akan dilakukan penyusutan atau amortisasi
 2. Waktu diperolehnya penghasilan
 3. Waktu diakuinya biaya

2.1.3.6 Biaya Menurut UU Perpajakan

Menurut Pajak, tidak semua biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat diakui sebagai pengurang, meskipun biaya tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha.

Hal ini disebabkan karena menurut ketentuan pajak, biaya fiskal digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yakni biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak dan biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Biaya Menurut (UU No. 36, 2008) Perpajakan , ada 3 Pendekatan dalam Pembebanan Biaya :

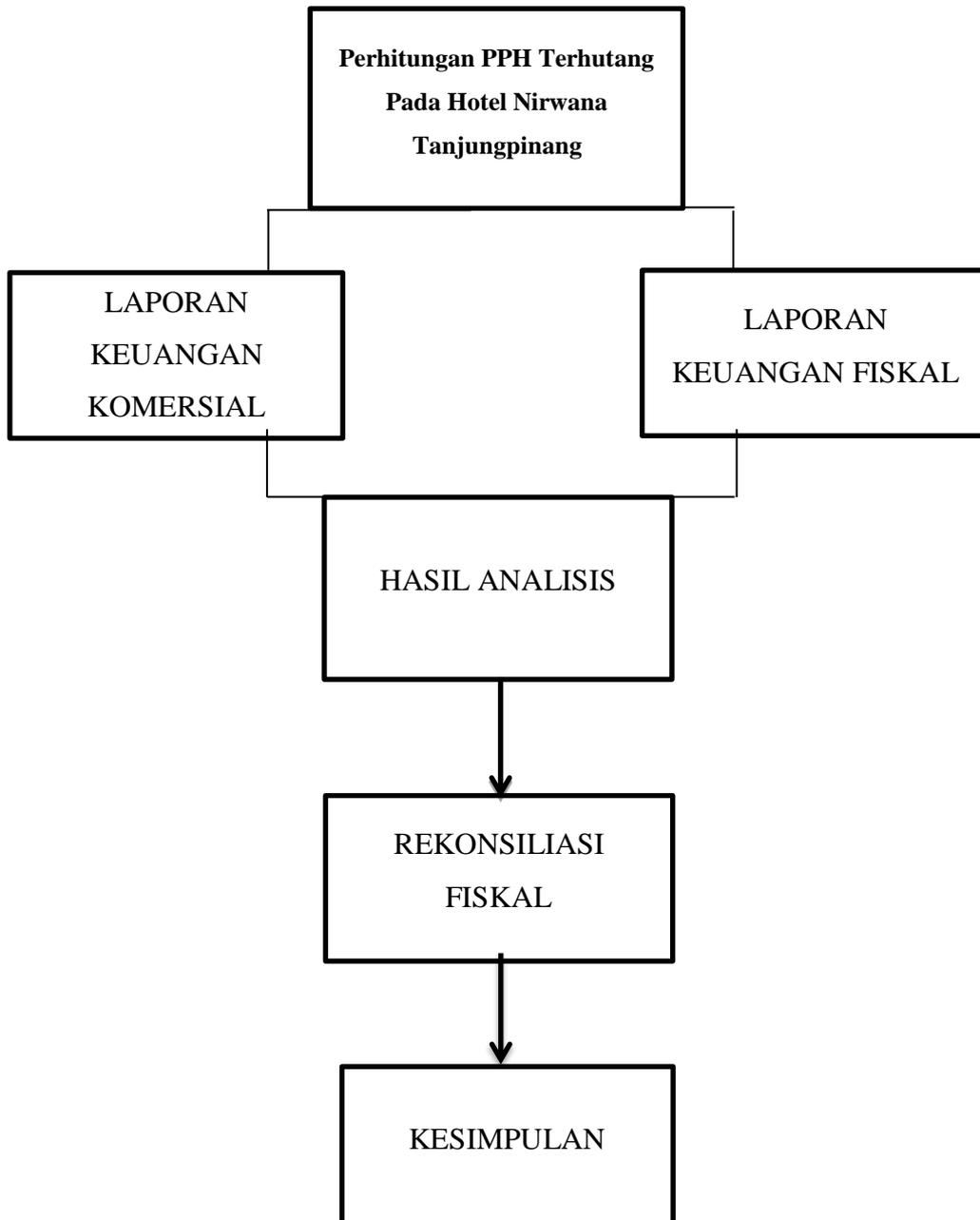
1. Sebab Akibat (Kausalitas) : Pendekatan sebab akibat ini mengaitkan biaya ini secara langsung dengan penghasilan. Pengakuan biaya sebagai beban dalam periode diakuinya penghasilan.
2. Alokasi Sistematis dan Rasional : Pendekatan ini tidak mengaitkan secara langsung biaya dengan penghasilan, tetapi biaya dialokasikan secara sistematis dan rasional dengan penghasilan atas dasar masa manfaat.
3. Pengakuan Segera : pendekatan pengakuan segera yaitu terhadap biaya yang dapat dikaitkan dengan penghasilan melalui pendekatan kesatu atau pendekatan kedua akan dibebankan segera terhadap penghasilan pada tahun pengeluaran.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran merupakan sintesis atau ekstrapolasi dari tinjauan teori yang mencerminkan keterkaitan antar variable dan merupakan tuntutan untuk memecahkan masalah penelitian. Adapun kerangka dalam penelitian ini dapat digambarkan melalui bagan alur berikut yang disertai penjelasan kualitatif

Gambar: 1.

KERANGKA PEMIKIRAN



Sumber: Konsep yang disesuaikan penelitian 2017.

Penulis melakukan penelitian pada Hotel Nirwana Tanjung pinang dengan mengambil data laporan keuangan yang menjadi objek penelitian adalah bagaimana penerapan rekonsiliasi dan mengoreksi laba komersial menjadi laba fiskal menurut standar Akuntansi keuangan dan undang-undang PPh di Hotel Nirwana Tanjung pinang.

2.3 Peneliti Terdahulu

Languju (2014) “Analisis Terhadap Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan Pada PT. Bitung Mina Utama Di Kota Bitung”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan koreksi fiskal pajak yang dilakukan pada laporan keuangan PT. Bitung Mina Utama dalam kurun waktu 2 tahun yaitu tahun 2012 dan tahun 2013. Pada tahun 2012 jumlah koreksi fiskal pajak positif masih tinggi dan kemudian pada tahun 2013 jumlah koreksi pajak positif mengalami penurunan yang cukup, sedangkan jumlah koreksi fiskal pajak negatif pada tahun 2012 cukup tinggi dan pada tahun 2013 jumlah koreksi fiskal pajak negatif mengalami penurunan yang signifikan sehingga menyebabkan laba perusahaan mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Sihombing (2012) “Analisis Penerapan Koreksi Fiskal PPh Badan Dalam Meminimalisir Pajak Terutang PT. Anugerah Mega Lestari”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan tetap antara standar akuntansi keuangan dan undang - undang perpajakan dalam pengakuan biaya pada perusahaan. Adanya perbedaan jumlah laba sebelum pajak antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Tidak diakuinya biaya-biaya dalam perpajakan membuat laba kena pajak semakin besar hal ini membuktikan

semakin membesar pajak terutang perusahaan. Dalam meminimalisir pajak terutang perusahaan terdapat pos-pos yang dapat dilakukan koreksi atas biaya yang terjadi pada perusahaan. Strategi perencanaan pajak yang digunakan tax avoidance, yaitu upaya wajib pajak untuk tidak melakukan perbuatan yang dikenakan pajak atau upaya-upaya yang masih dalam kerangka ketentuan peraturan undang-undang perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Biaya tersebut meliputi: biaya makan, biaya rupa-rupa dan biaya pengobatan.

Siregar (2011) “Analisis Koreksi Fiskal Untuk Menghitung Besarnya PPh Terutang Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan”. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan PT. Perkebunan Nusantara III (persero) Medan telah membuat koreksi fiskal untuk menghitung besarnya pajak penghasilan. Koreksi fiskal disebabkan adanya perbedaan temporer dan perbedaan tetap antara laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan dan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008. Penelitian oleh Siregar dengan penelitian yang penulis buat ini memiliki persamaan yakni melakukan analisa laporan keuangan komersial dan ketentuan undang-undang perpajakan, dan perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti di atas hanya menganalisis koreksi fiskal untuk menghitung PPh terutang sedangkan peneliti menganalisis koreksi fiskal seluruh elemen yang ada dalam laporan keuangan khususnya laporan laba-rugi.

Indra Bastian (2017) “Fiscal Correction Due to Tax Regulations: Case Study of Klaten Local Bank, Indonesia”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan perbedaan interpretasi terkait pembentukan cadangan mendanai

dan menghapus piutang tak tertagih Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sesuai dengan peraturan perbankan dan menurut UU Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya. Dengan tidak mengakui kredit macet bank yang telah dihapus bukukan dalam akuntansi, koreksi fiskal dilakukan melalui proses pemeriksaan pajak. Pada saat yang sama, dana cadangan yang didirikan telah diakui oleh manajemen sebagai piutang cadangan, dimana audit pajak menganggap bahwa ini dimotivasi untuk menurunkan nilai pajak yang dikumpulkan.

Tommy Kurniasih (2013) berdasarkan hasil penelitian menunjukkan ROA, Leverage, tata kelola perusahaan, ukuran perusahaan, dan kompensasi kerugian fiskal memiliki dampak yang signifikan secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam periode BEI 2010. ROA, Ukuran perusahaan dan kompensasi fiskal yang hilang mempengaruhi penghindaran pajak secara parsial dan signifikan. Leverage dan tata kelola perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan parsial terhadap penghindaran pajak.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dimana penelitian dengan menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif memiliki tujuan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan, juga fenomena serta keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Seperti halnya yang disampaikan menurut (Sugiyono, 2015) , penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (Independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Penelitian ini biasanya menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi dan sebagainya.

Dimana menurut (Moleong, 2010) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Dengan demikian, pada penelitian ini penulis bermaksud mengumpulkan data Laporan keuangan pada Hotel Nirwana Tanjung Pinang kemudian hasilnya dideskripsikan atau digambarkan secara jelas sebagaimana kenyataan antara Laporan keuangan Komersial dan Laporan keuangan Fiskal

3.2 Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Hotel Nirwana Tanjung pinang. Dan, data yang akan digunakan adalah laporan laba rugi komersial pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa ini. Kemudian yang menjadi subjek penelitian ini adalah Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial.

3.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung yang memerlukan pengolahan lebih lanjut dan dikembangkan dengan pemahaman sendiri oleh penulis. Di mana menurut (Sugiyono, 2015) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

2. Data Sekunder

Metode pengumpulan data sekunder yang didapat yaitu dengan cara membaca dan mempelajari buku – buku yang mendukung penelitian, literatur yang berupa majalah ilmiah, surat kabar, jurnal, artikel, serta makalah.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Salah satu komponen yang penting dalam penelitian adalah proses peneliti dalam pengumpulan data. Kesalahan yang dilakukan dalam proses pengumpulan data akan membuat proses analisis menjadi sulit. Selain itu hasil dan kesimpulan yang akan didapatpun akan menjadi rancu apabila pengumpulan data dilakukan tidak dengan benar. Menurut (Sujarweni, 2014) metode pengumpulan data merupakan suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan dan panyajian fakta untuk tujuan tertentu. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari Hotel Nirwana Tanjung Pinang dengan melakukan:

1. Wawancara, (Interview)

Menurut (Sugiyono, 2015) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan tanya jawab secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak-pihak terkait dalam penyediaan informasi yang diperlukan, dengan berpedoman kepada daftar wawancara yang telah disusun sedemikian rupa. Adapun alat yang digunakan adalah pedoman wawancara.

2. Dokumentasi

Menurut (Sugiyono, 2015) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan

harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa an lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain lain.

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi dilakukan dengan mengadakan penelaahan dan pencatatan dokumen-dokumen tertulis perusahaan.

3. Studi Pustaka

Menurut (Sugiyono, 2015) tinjauan pustaka adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan mendengarkan laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Data yang diambil pada penelitian ini bersumber dari perpustakaan dan internet. Kegiatan ini merupakan bagian yang penting dari pendekatan ilmiah yang harus dilakukan dalam setiap penelitian ilmiah dalam suatu bidang ilmu.

3.5 Definisi Operasional

- a. Koreksi Fiskal Koreksi fiskal adalah penyesuaian ketentuan menurut pembukuan secara komersial atau akuntansi yang harus disesuaikan menurut ketentuan perpajakan .
- b. Laporan Keuangan Komersial Laporan keuangan komersial adalah
- c. laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai dalam rangka pengambilan keputusan.

Adapun tariff dan keterlambatan, baik dalam menyetor maupun melapor, dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku pada PPh pasal 25

1. Tarif PPh pasal 25

Pajak penghasilan badan memiliki tarif yang berlaku berdasarkan pada Undang – Undang pajak penghasilan No.36 Tahun 2008 Pasal 31 E

a. Omset $\leq 4,8$ M =tarif 50% x 28% x PKP

b. Omset $>4,8$ M ≥ 50 M = tariff 1. 50% x 28% x PKP

2. 28 % x PKP

c. Omset diatas = 50M = tarif 28% x PKP

2. Sanksi-sanksi keterlambatan pembayaran PPh pasal 25

Apabila wajin pajak (WP) terlambat membayar, maka wp akan dikenai bunga sebesar 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.

Misalnya: untuk bulan Februari 2014, WP terlambat dan baru membayarnya pada 16 Maret. Sesuai pasal 9 ayat(2a) UU KUP, WP dikenai bunga 2%.

3.6 Teknik Pengolahan Data

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan mencakup analisis deskriptif yang didasarkan pada penggambaran yang mendukung analisa tersebut. Menurut (Sugiyono, 2015) analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai lapangan dan analisis lebih difokuskan selama proses

dilapangan selama melakukan pengumpulan data. Yaitu suatu penelitian dengan mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menganalisis data angka, agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan.

3.7 Teknik Analisis data

Menurut (Sugiyono, 2015) analisis data kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) yang dimana peneliti merupakan sebagai instrumen kunci dari pengambilan sampel sumber data yang dilakukan dengan cara purposive dan snowball, teknik pengumpulan triangulasi, analisa data yang bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna garis generalisasi. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan cara mengumpulkan data Laporan keuangan Hotel Nirwana Tanjung pinang.

Analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dari perusahaan berupa laporan keuangan komersial yang meliputi neraca, laporan laba rugi, rekonsiliasi fiskal, daftar aktiva tetap serta data lain yang diperlukan.
- b. Mengevaluasi tiap-tiap akun laporan keuangan komersial khususnya laporan laba rugi yang terdiri dari penjualan, harga pokok penjualan, beban penjualan, beban umum dan administrasi, pendapatan dan beban lain-lain berdasarkan data yang sudah dikumpulkan penulis dari perusahaan.

- c. Melihat kesesuaian tiap-tiap akun laporan laba rugi dengan ketentuan perpajakan yang berlaku untuk menentukan perlu tidaknya dilakukan koreksi fiskal dan menentukan besarnya koreksi jika ternyata dilakukan koreksi fiskal
- d. Mengevaluasi daftar aktiva tetap perusahaan berikut penyusutan aktiva tetap secara komersial.
- e. Melakukan perhitungan penyusutan aktiva tetap secara fiskal berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku untuk menentukan besarnya koreksi fiskal atas biaya penyusutan aktiva tetap.
- f. Menyusun rekonsiliasi fiskal atas koreksi fiskal beda tetap dan beda waktu yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- g. Menghitung laba kena pajak dan menentukan jumlah Pajak Penghasilan yang harus dibayar perusahaan pada tahun tersebut.
- h. Mengidentifikasi penyebab kenaikan (penurunan) jumlah pajak terhutang tahun tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisamartha, F. (2015). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Intensitas Persediaan dan Intensitas Aset Tetap Pada Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan.
- Adriani. (2014). *Teori Perpajakan, Jakarta : Salemba Empat*.
- Brolin, A. R. (2014). Analisis Pengaruh Book-Tax Differences terhadap Pertumbuhan Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.
- Carter, W. K. (2009). *Akuntansi Biaya "Cost Accounting" . Jakarta : Salemba Empat*.
- Darmawan. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak.
- Dharma. (2016). Pengaruh Leverage, Intensitas Asset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance.
- Djajadiningrat, S. I. (2008). *Sistem Akuntansi Pajak. Jakarta. Salemba Empat*.
- Fadlilah. (2013). Determinan dan Moderasi Boox Tax Differences terhadap Pertumbuhan Laba Perbankan. *Accounting Analysis Journal: Volume 2, No 4. Journal 2, No 4*.
- Febiyanto. (2014). Pengaruh Perbedaan Laba Akuntansi dan Laba Fiskal (Boox-tax Differences) Terhadap Pertumbuhan Laba. *Jurnal Universitas Diponegoro Vol 3, No 3., 3*.
- Fidel. (2010). Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-masalah Perpajakan. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Fitri. (2014). Pengaruh Book-Tax Differences Terhadap Pertumbuhan Laba. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Hasanuh, N. (2011). *Akuntansi Dasar Teori dan Praktik*. Jakarta:Penerbit Mitra Wacana Media.
- Hery. (2014). *AKUNTANSI PERPAJAKAN*. PT Grasindo, Jalan Palmerah Barat 33-37, Jakarta 10270.
- Hery. (2016). *PPH dan PPN Mengenal dan Memahami Konsep PPh serta PPN, Ditinjau dari Aspek Perpajakan maupun Akuntansi*. PT Grasindo, Anggota IKAPI.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2018). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

- Ikatan Akuntansi Indonesia No.1. (2015). *Penyajian Pelaporan Keuangan*.
- Kartikahadi, H. (2016). *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS Buku 1. Jakarta : Salemba Empat*.
- Donald E. Kieso Jerry Weygandt (2014). *Intermedite Accounting Volume 1 IFRS Edition, United States of Amerika*.
- Donald E. Kieso Jerry Weygandt (2016). *Perlakuan Akuntansi Pendapatan dan Beban Berbasis SAK ETAP dan Implikasinya Pada Laporan Keuangan Koperasi Karyawan Karya Sampurna PT. BANK MANDIRI*.
- Mardiasmo. (2018). *PERPAJAKAN. C. V ANDI OFFSET*.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muljono. (2009). *Akuntansi Pajak Lanjutan*. Andi Offset, Yogyakarta.
- Pajak, D. J. (2013). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 20/PJ.03/2013 Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data dan Pemindehan*.
- Pajak, D. J. (2015). *BIJAK - Orang Pribadi Pintar Pajak Cetakan Pertama November 2015*. Jakarta Selatan 12190.
- Resmi, Siti. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus, Buku 1 edisi 8. Salemba Empat. Jakarta*.
- Soemitro. (2014). *Perpajakan. Jakarta : Salemba Empat*.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&B. Bandung: Alfabeta*. Bandung: Alfabeta.
- Suhayati, E. (2009). *Akuntansi Keuangan (Graha Ilmu)*. Graha Ilmu.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami. Yogyakarta: Pustaka Baru Press*.
- Suwardjono. (2013). *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan Edisi Ketiga*. UGM.
- Thomson. (2008). *Warren Reeve Fess Accounting Pengantar Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat*.
- Trisnawati, E. (2013). *AKUNTANSI PERPAJAKAN. Edisi Ketiga. Jakarta : Salemba Empat*.

UU No. 36. (2008). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008
Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983
Tentang Pajak Penghasilan.

Warsono-bin-Hardono. (2013). *Akuntansi Pengantar 1 Sistem Penghasil
Informasi Keuangan Adaptasi IFRS*. ABPUBLISHER YOGYAKARTA
PENERBIT BUKU AKUNTANSI.

RIWAYAT HIDUP (*Curriculum Vitae*)



Nama : Lilis Suryani
Tempat / Tanggal Lahir : Tanjungpinang / 22 Desember 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Nomor Handphone : 0822-7238-8983
Email : kangenkamunih21@gmail.com
Alamat : Jalan Pantai Impian Gang. Lumba-lumba satu
Kelurahan Kampung Baru
Kecamatan Tanjungpinang Barat

Riwayat Pendidikan

- a. SD : SD 012 Tanjungpinang Barat
- b. SMP : MTsn (Madrasah Tsanawiyah Negeri) Tanjungpinang
- c. SMA : MAN (Madrasah Aliyah Negeri) Tanjungpinang
- d. S1 : STIE (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi) Pembangunan
Tanjungpinang